

DAFTAR ISTILAH DALAM PERMENDAGRI NO 13 TAHUN 2006

NO	ISTILAH	KEPANJANGAN	FUNGSI
1	APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah
2	SKPKD	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	Perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah
3	PPKD	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah
4	TAPD	Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan
5	SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang
6	BUD	Bendahara Umum Daerah	PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah
7	Kuasa BUD	Kuasa Bendahara Umum Daerah	Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD
8	Kas Umum Daerah		Tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah
9	PPK-SKPD	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD	Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD
10	PPTK	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya
11	RPJPD	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah	Dokumen perencanaan jangka panjang daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
12	RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk periode 5 (lima) tahun
13	RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Dokumen perencanaan jangka pendek daerah untuk periode 1 (satu) tahun
14	Renstra SKPD	Rencana Strategis SKPD	Dokumen perencanaan strategis SKPD untuk periode 5 (lima) tahun
15	Renja SKPD	Rencana Kerja SKPD	Dokumen perencanaan kerja SKPD untuk periode 1 (satu) tahun
16	Musrenbang	Musyawaharah Perencanaan Pembangunan	Aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah
17	Pendapatan		Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
18	Belanja Tidak Langsung		Belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan
19	Belanja Langsung		Belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan
20	Pembiayaan		Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya
21	KUA	Kebijakan Umum APBD	Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun
22	Program		Penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD
23	Kegiatan		Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (<i>input</i>) untuk menghasilkan keluaran (<i>output</i>) dalam bentuk barang/jasa
24	Kinerja Kegiatan		Keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur
25	PPAS	Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	Rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD
26	PPA	Prioritas dan Plafon Anggaran	Program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD
27	RKA-SKPD	Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD
28	SiLPA	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya	Mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan
29	DPA-SKPD	Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran

30	DPPA-SKPD	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD	Dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran
31	DPAL-SKPD	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD	Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran lanjutan oleh pengguna anggaran
32	Anggaran Kas		Dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode
33	SPD	Surat Penyediaan Dana	Dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP
34	STS	Surat Tanda Setoran	Dokumen yang diselenggarakan bendahara penerimaan atau pejabat penatausahaan pada satuan kerja perangkat daerah untuk menyetor penerimaan daerah
35	TBP	Tanda Bukti Pembayaran	Dokumen yang menjadi bukti /dasar atas diterimanya suatu penerimaan
36	BPK	Bukti Pengeluaran Kas	Dokumen yang menjadi bukti /dasar atas dikeluarkannya suatu pengeluaran
37	SPP	Surat Permintaan Pembayaran	Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran
38	SPP-UP	SPP Uang Persediaan	Dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (<i>revolving</i>) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung
39	SPP-GU	SPP Ganti Uang Persediaan	Dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung
40	SPP-TU	SPP Tambahan Uang Persediaan	Dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan
41	SPP-LS	SPP Langsung	Dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK
42	SPM	Surat Perintah Membayar	Dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD
43	SPM-UP	Surat Perintah Membayar Uang Persediaan	Dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan
44	SPM-GU	Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan	Dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan
45	SPM-TU	Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan	Dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan
46	SPM-LS	Surat Perintah Membayar Langsung	Dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga
47	SP2D	Surat Perintah Pencairan Dana	Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM
48	DP	Daftar Penguji	Dokumen yang memuat daftar SP2D yang bisa dicairkan
49	BKU	Buku Kas Umum	Dokumen yang digunakan kuasa BUD dalam menatausahakan penerimaan dan pengeluaran
50	KarKenKeg	Kartu Kendali Kegiatan	Dokumen yang memuat daftar SP2D yang sudah dicairkan
51	SPJ	Surat Pertanggung Jawaban	Dokumen yang digunakan bendahara pengeluaran SKPD dalam menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran
52	Jurnal Penerimaan Kas		Catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan menggolongkan semua transaksi atau kejadian yang berhubungan dengan penerimaan kas
53	Jurnal Pengeluaran Kas		Catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan menggolongkan semua transaksi atau kejadian yang berhubungan dengan pengeluaran kas
54	Jurnal Memorial		Dokumen yang memuat koreksi atas transaksi atau kejadian keuangan yang telah dicatat dalam buku jurnal dan dibukukan kedalam buku besar
55	Jurnal Korolari		
56	Buku Besar		Catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat peringkasan (<i>posting</i>) semua transaksi atau kejadian selain kas dari jurnal ke dalam buku besar untuk setiap rekening aset, kewajiban, ekuitas dana, belanja, pendapatan dan pembiayaan
57	LRA	Laporan Realisasi Anggaran	Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan
58	Arus Kas		Laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan
59	Neraca		Laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dan pada tanggal tertentu
60	CALK	Catatan Atas Laporan Keuangan	Dokumen yang menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas